

RESUME
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2015

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total: 1.566
	a) Permintaan informasi	: 1.010
	b) Pengaduan masyarakat	: 555
	c) Komplain atas informasi	: 1
2.	Mayoritas Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (517 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah (222 pengaduan)
	c) Komplain atas Informasi	: Permohonan pemeriksaan investigatif BPK
3.	Pengaduan/Permintaan Informasi/Komplain atas Informasi Dalam Proses:	
	a) Permintaan Informasi	: 2 permintaan dalam proses
	(1)	Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN
	(2)	Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011
	b) Pengaduan Masyarakat	: 17 pengaduan dalam proses
	(1)	Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP, sehingga e-lelang dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	(2)	Permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN, karena tidak segera diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di seluruh pulau-pulau Rempang Galang oleh BPN
(3)	Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS)	
(4)	Permohonan pemeriksaan pada pelaksanaan kegiatan RHL/PPMPBK di Sub-DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K yang belum terencana, komprehensif dan integral	
(5)	Permintaan audit BUMD Kabupaten Bogor PD. Pasar Tohaga, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pembangunan Pasar Parungpung yang dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor	
(6)	Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	

	<p>(7) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan</p> <p>(8) Pengaduan terkait Pemerintah Kota Bandung yang telah menyewakan tanah milik Ny. Atini Binti Raden Paiman Sumarno seluas 31,5 hektar di Jalan Tamansari, Bandung , untuk digunakan sebagai Kebun Binatang Bandung yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Taman Sari Bandung (Zoological Garden)</p> <p>(9) Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji</p> <p>(10) Indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, terkait penerbitan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok Pemerintah Kota Salatiga yang tidak sesuai peruntukan</p> <p>(11) Dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.</p> <p>(12) Pengaduan terkait permohonan peninjauan kembali atas penghapusan beban hutang sebesar Rp 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspen untuk dikembalikan kepada negara, serta untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp 21.955.000</p> <p>(13) Permohonan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional agar BPK dapat memberikan bantuan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Labuhan Batu, berdasarkan surat pengaduan dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Labuhan Batu.</p> <p>(14) Indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan</p> <p>(15) Pengaduan terkait kegiatan mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi</p> <p>(16) Indikasi pelanggaran kode etik terkait dugaan manipulasi, kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor, yang dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi, yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi selaku Anggota BPK</p> <p>(17) Meminta Klarifikasi kepada BPK terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK</p>
c)	<p>Keberatan atas Informasi : 1 kasus</p> <p>Keberatan atas belum ditanggapinya permohonan informasi dasar hukum atas belum ditindaklanjutinya pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara dalam kerja sama perusahaan air antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang</p>

4.	Alasan penolakan permohonan informasi publik
	<p>BPK menyampaikan tanggapan terkait keberatan atas informasi perihal permohonan informasi dasar hukum atas belum ditindaklanjutinya pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara dalam kerja sama perusahaan air antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>bahwa tidak terdapat dasar yang kuat untuk dilakukannya pemeriksaan investigatif, seperti yang dimohon oleh pemohon informasi.</p>